

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**(Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2020)**

Ketua Tim:

Dr. Eka Wardhani, ST., MT

Anggota Tim:

Dr. Eng Didin Permadi Agustian, ST., MT

**Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Ketua Tim Pengusul

Nama : Dr. Eka Wardhani, ST.,MT
NIP : 050503
Jabatan/Golongan : Lektor/III.D
Jurusan/Fakultas : Teknik Lingkungan/Teknik Sipil dan Perencanaan
Bidang Keahlian : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
Alamat Kantor : Jurusan Teknik Lingkungan Jl. PHH Mustofa 23 Bandung 40123
Alamat Rumah : Jl. Tebu Ireng No 22 Komplek Pasir Jati Ujung Berung 40616

Lokasi Kegiatan

Wilayah Mitra : Pemda Kabupaten Bandung Barat
Desa/Kecamatan : Mekarsari/Ngamprah
Kota/Kabupaten : Kabupaten Bandung Barat
Provinsi : Jawa Barat
Jarak PT ke Mitra : 28 km
Luaran yang Dihasilkan : Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
Total Biaya :-

Bandung, 18 Agustus 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Ketua Tim Pengusul


FTSP

(Dr. Soni Darmawan, ST.,MT)
NIP: 0412017610



(Dr. Eka Wardhani, ST.,MT)
NIP: 20050503

Disahkan Oleh
Ketua LP2M,


FTSP

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NIP: 20010601

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang	1
2. Maksud.....	1
5. Hasil Kegiatan.....	1
6. Kesimpulan	8

LAMPIRAN 1. SK Pembentukan Tim Penyusun DIKPLH KBB tahun 2020

LAMPIRAN 2. Berita Acara penentuan isu Prioritas DIKPLH KBB tahun 2020

LAMPIRAN 3. Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Undangan DIKPLH KBB tahun 2020

LAMPIRAN 4. Contoh Materi Pembahasan

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Khusus di bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Atas dasar uraian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dengan metode pendekatan P-S-R (*Pressure-State-Response*) sesuai dengan Pedoman Nirwasita Tahun 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Diharapkan proses dan ketersediaan dokumen ini dapat memberikan bekal kesamaan informasi dan kesepakatan rencana tindak diantara para pelaku kunci untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

1.2. Maksud

Tersusnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat tahun 2020

1.3. Hasil Kegiatan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulungan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan

telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dengan metode pendekatan D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) sesuai dengan Pedoman Nirwasita Tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Diharapkan proses dan ketersediaan dokumen ini dapat memberikan bekal kesamaan informasi dan kesepakatan rencana tindak antara para pelaku kunci untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

1.3.1. Deskripsi Isu-Isu Lingkungan Di Kabupaten Bandung Barat

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Kabupaten Bandung Barat memiliki beberapa permasalahan lingkungan hidup yang menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah sebagai bahan pertimbangan penentuan isu prioritas lingkungan hidup. Berdasarkan pedoman penyusunan DIKPLHD tahun 2019, isu lingkungan yang akan dianalisis, yaitu: tata guna lahan; kualitas air; kuantitas air; kualitas udara; risiko bencana; persampahan; dan tata kelola.

- **Tataguna Lahan**

Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah sebesar 1.305,77 km² atau 130.577,40 Ha. Sedangkan luas kawasan hutan sebesar 42.865,51 Ha dengan jumlah alih fungsi lahan hutan mencapai 10.435,415 Ha atau sebesar 24,34% dari luas hutan. Pengalihan fungsi lahan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur perkotaan.

Lahan kritis tersebut tentunya akan menimbulkan dampak bencana seperti banjir bandang, longsor ataupun pergerakan tanah. Selain bencana, dampak lainnya adalah pencemaran kualitas udara. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menanggulangi permasalahan tersebut berupaya dengan membuat aturan dan pengawasan terhadap izin lingkungan serta melakukan penghijauan dengan menanam pohon.

- **Kualitas Air**

Seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, meskipun kondisi hidrologi setiap wilayah berbeda. Luas daerah tangkapan DAS Citarum sekitar 268.130 Ha. Hasil pengukuran yang dilakukan di 54 titik pantau sungai yang melawati Kabupaten Bandung Barat menunjukkan status mutu air yang dominan cemar sedang, yaitu dengan Indeks Pencemar berada pada nilai rentang 5-10. Nilai tersebut berpengaruh terhadap parameter kualitas air, di mana masih ada parameter biologis dan kimia yang tidak memenuhi baku mutu untuk kelas II berdasarkan PP RI No.82 tahun 2001, seperti total dan fecal *coliform*, BOD, COD, TDS, TSS, Fenol dan H₂S. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menanggulangi permasalahan tersebut berupaya dengan membuat aturan pengendalian pencemaran air limbah dan mengembangkan aplikasi pemantauan kualitas air sungai.

- **Kuantitas Air**

Selain terjadi perubahan kualitas air, kuantitas air baku khususnya air tanah berkurang karena adanya tekanan dari pemakaian air baku yang digunakan oleh penduduk ataupun industri di Kabupaten Bandung Barat. Dampak dari pencemaran kualitas air dan pengurangan kuantitas air ini adalah terdapat 10 kecamatan yang mengalami krisis air bersih ketika musim kemarau dan pencemaran air irigasi untuk pertanian. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah menyusun rancangan *Masterplan* Air Minum (SIMPAM).

- **Kualitas Udara**

Hasil pemantauan yang dilakukan pada tahun 2020 di beberapa titik pemantauan dibandingkan dengan PPRI No 41 Tahun 1999 untuk parameter SO₂, CO, O₃ dan NO₂ terukur 1 jam menunjukkan

semua parameter tersebut berada di bawah baku mutu. Hasil proses produksi dari pembakaran adalah polusi udara yang berbahaya, seperti SO₂, O₃, NO₂, dan partikel debu dan apabila polusi udara tersebut terhirup dapat menyebabkan kelainan pada saluran pernafasan. Selain itu, wilayah Kabupaten Bandung Barat di Jalan Raya Padalarang sering terjadi kemacetan ini karena jalan tersebut sering dilintasi kendaraan besar dan kecil disetiap jam kerja. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menanggulangi permasalahan tersebut berupaya dengan membuat aturan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi secara berkala serta pembentukan alternatif jalur kemacetan.

- **Resiko Bencana**

BPBD Kabupaten Bandung Barat menyatakan telah terjadi 112 kejadian bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat dari Januari hingga awal Juni 2019. Kejadian bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah longsor, kebakaran dan angin puting beliung, banjir bandang, dan pergerakan tanah dengan bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat adalah longsor. Penyebab terjadi bencana, yaitu ketika curah hujan yang tinggi disertai angin kencang dan sistem drainase yang buruk.

Dampak dari bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat berupa kerugian materil, seperti peralatan rumah tangga yang terendam, infrastruktur kota yang rusak, dan rumah warga yang terendam. Selain kerugian materil, dampak lain yang ditimbulkan yaitu satu korban yang meninggal dunia akibat longsor.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menanggulangi permasalahan tersebut melakukan upaya sebagai berikut melakukan normalisasi Kali Cihaur; membangun tanggul disekitar Kali Cihaur; membersihkan saluran drainase dari sumbatan sampah; mengidentifikasi dan menebang pohon-pohon yang rawan tumbang; melakukan perkerasan dan perbaikan drainase di titik-titik longsor; menanggulangi lahan kritis dengan melakukan penanaman 1.000 pohon; dan Program Citarum Harum.

- **Persampahan**

Prakirakan timbulan sampah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2018 sebesar 1.368 ton/hari atau 4.169,31 m³/hari dengan jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebesar 362 ton/hari (55%), dan sampah yang terolah di sumber sebesar 297 ton/hari. Sumber timbulan sampah yang dominan di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sampah rumah tangga. Hal ini karena daya beli masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang rendah.

Isu persampahan juga termasuk jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang terbatas, yaitu hanya memiliki empat armada pengumpulan/pengangkut sampah liar (ASPL) yang beroperasi di Lembang sebanyak 1 unit, Cikalongwetan 1 unit, Batujajar-Cililin 1 unit dan Ngamprah 1 unit. Sarana dan prasarana pengumpulan sampah yang terbuka berpotensi menyebabkan lindi terutama ketika terjadi hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dampak dari adanya isu persampahan ini adalah bisa menyebabkan bencana ataupun penyakit bagi manusia. Bencana yang terjadi seperti longsor dari timbunan sampah, sedangkan penyakit berupa pencemaran yang disebabkan dari tumpukan sampah yang dikerubuni oleh lalat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menanggulangi permasalahan tersebut melakukan upaya pengembangan kegiatan pengelolaan persampahan, seperti kegiatan komposting, pemulung, dan pengelolaan lindi. Selain itu, kelompok masyarakat Kabupaten Bandung Barat memiliki inisiatif yang tinggi untuk mengadakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti kegiatan sampah, mengolah sampah (*reduce, reuse, recycle*), dan program penghijauan dengan menanam bibit pohon.

- **Tata Kelola**

Tata kelola merupakan suatu bentuk ataupun tanggung jawab pemerintah yang meliputi wewenang administrasi, ekonomi, lingkungan, sosial hingga politik. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan program di bidang lingkungan memerlukan SDM yang dapat mengelola lingkungan hidup. Adapun jumlah SDM dalam bidang lingkungan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 63 orang di mana terdapat 4 orang sebagai staf fungsional.

Jumlah dan kapasitas SDM yang kurang memadai tentunya menyebabkan program lingkungan menjadi terhambat, banyak keluhan dari masyarakat, dan kesehatan masyarakat akibat dari pencemaran lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menanggapi permasalahan tersebut dengan memberikan pelatihan dan pendidikan dasar bagi staf, memberikan penghargaan lingkungan kepada masyarakat dan membuat produk hukum untuk mengatur dan menetapkan suatu keputusan khususnya terkait izin lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bandung Barat

Hasil identifikasi isu lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung Barat diinformasikan kepada *stakeholder* untuk menetapkan isu prioritas yang akan dipilih. Tiga isu prioritas lingkungan hidup dipilih berdasarkan kesepakatan seluruh *stakeholder*. Hasil dari kesepakatan seluruh *stakeholder* terkait permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat terdiri dari permasalahan ketersediaan air bersih, permasalahan persampahan, dan pencemaran air. Adapun pertimbangan dan penjelasan isu prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.2.1. Isu Prioritas Ketersediaan Air

✓ Faktor Pendorong

Faktor pemicu untuk isu ketersediaan air bersih ini adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang kemudian mendorong peningkatan penggunaan air bersih dalam aktifitas rumah tangga, pertanian, ekonomi dan industri. Hanya saja, masih banyak penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih sementara jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain itu pertumbuhan ekonomi memicu pertumbuhan industri serta pertanian yang mendorong penggunaan air lebih banyak.

✓ Tekanan

Faktor penekan yang mendorong timbulnya isu ketersediaan air bersih adalah sebagai berikut:

- Sumber air permukaan lain sudah tercemar sehingga tidak dapat digunakan untuk pengairan pertanian misalnya atau untuk kebutuhan lainnya
- Pemakaian air tanah yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan domestik di Kabupaten Bandung Barat dapat diperkirakan mencapai 242.386,2 m³/hari atau 88.470.963 m³/tahun sehingga mendorong ekstraksi air tanah secara intensif

✓ Status

Tekanan dari pemakaian air baku yang tiap tahun selalu bertambah menyebabkan ketersediaan air di Kabupaten Bandung Barat akan semakin berkurang. Menurut DLH Kabupaten Bandung Barat, ada satu dari 16 kecamatan yang hanya memiliki nilai neraca air positif, sedangkan kecamatan lainnya bernilai negatif. Kondisi neraca air yang negatif didapatkan dari nilai potensi total (m³/tahun) dikurangi dengan kebutuhan air (m³/tahun) dari masing-masing kecamatan. Kekurangan ini karena kecamatan tersebut tidak memiliki debit air yang cukup di sumber airnya khususnya sumber air baku air tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Sedangkan menurut data dari BPPD Kabupaten Bandung Barat (2019), ada 10 kecamatan yang mengalami krisis air bersih, yaitu Kecamatan Cipatat, Cihampelas, Padalarang, Cipeundeuy, Cisarua, Batujajar, Ngampah, Parongpong, Cipongkor dan Sindangkerta. Masyarakat yang paling sering terkena dampak krisis air bersih berada di Kecamatan Cipatat.

✓ Dampak

Defisit kuantitas air baku ini akan menyebabkan terganggunya pola konsumsi air terutama di masyarakat (krisis air bersih). Jumlah debit air baku yang semakin berkurang dan terjadinya musim kemarau panjang di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan potensi air dari sumber air baku (mata air, ledeng, dan sumur) mengalami kekeringan atau krisis air bersih.

✓ Respon

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan beberapa upaya untuk pengelolaan permasalahan ketersediaan air baku ini. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cimahi menyusun SIMPAM yang bersumber air baku Mata Air Cijanggal dan Mata Air Cikalongwetan. Selain itu untuk beberapa daerah pemukiman yang mengalami krisis air bersih pihak pemerintah bekerjasama dengan PDAM untuk menyalurkan air bersih dengan truk.

1.3.2.2. Isu Prioritas Persampahan

✓ **Faktor Pendorong**

Jumlah penduduk yang terus bertambah dan tingkat ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi timbulan sampah. Tingkat ekonomi akan mempengaruhi juga pola pembuangan sampah dari setiap individunya. Selain itu, tingkat pelayanan sistem pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat akan menjadi pemicu permasalahan persampahan ini. TPA Sarimukti yang merupakan TPA regional berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 48 ha dengan volume eksisting yaitu 1,922,637 m³. Volume eksisting terbagi menjadi 4 zona, dimana zona 1 seluas 700.000 m³ sudah tidak aktif (tidak dipergunakan lagi).

✓ **Tekanan**

Perilaku dan kesadaran masyarakat yang rendah serta keterbatasan cakupan pelayanan pembuangan sampah di wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan sampah tidak dibuang pada tempatnya, seperti dibuang ke sungai dan lahan-lahan kosong di pinggir jalan. Sampah yang dibuang sembarangan tentunya menyebabkan saluran-saluran air buangan dan drainase menjadi tersumbat. Selain itu, tempat pemrosesan akhir sampah perkotaan di Kabupaten Bandung Barat adalah TPA Sarimukti. TPA Sarimukti masih menggunakan metode *control landfill*, yaitu sampah dibuang lalu sampah ditutup dengan tanah setelah TPA penuh sampai periode tertentu.

✓ **Status**

Prakiran timbulan sampah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2018 sebesar 1.368 ton/hari atau 4.169,31 m³/hari. Sumber timbulan sampah tersebut berasal dari kegiatan rumah tangga, kantor, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Sedangkan 52% dari sampah yang timbulan atau sebesar 711,4 ton/hari masih belum terlayani. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebesar 362 ton/hari (55%), dan sampah yang terolah di sumber sebesar 297 ton/hari.

Namun, tingkat pelayanan pengangkutan sampah masih rendah di Kabupaten Bandung Barat karena sarana dan prasarana sampah terbatas. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya memiliki empat armada pengangkut sampah liar (ASPL) yang beroperasi di Lembang 1 unit, Cikalongwetan 1 unit, Batujajar-Cililin 1 unit dan Ngamprah 1 unit. Namun, sampah liar yang tidak terlayani masih ada di 12 kecamatan lainnya.

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka ini berpotensi menyebabkan lindi terutama ketika terjadi hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Lindi mengandung zat organik, zat anorganik dengan konsentrasi tinggi, apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan mencemari lingkungan sekitarnya, seperti tanah sekitarnya, air tanah maupun air sungai.

✓ **Dampak**

Tumpukan sampah secara terbuka akan dikerubungi lalat dan menjadi tempat pembiakan lalat yang mendorong penularan infeksi dan penyakit, seperti muntaber, typhus, malaria hingga demam. Sampah yang tertumpuk akan berbahaya ketika memasuki musim hujan karena menyebabkan kejadian bencana longsor dan korban meninggal dunia.

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sekitarnya. Selain itu, pembakaran sampah seringkali terjadi pada sumber dan titik lokasi pengumpulan apabila terjadi penundaan proses pengangkutan. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran tentunya sangat berpotensi menyebabkan gangguan terhadap kesehatan dan lingkungan. Pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan gas beracun, seperti CO.

✓ **Respon**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan beberapa upaya pengelolaan isu persampahan, yaitu mengelola sampah di TPA Sarimukti dengan membuat fasilitas komposting, memfasilitasi pemulung untuk melakukan kegiatan pemisahan sampah yang bernilai jual, dan membuat fasilitas pengelolaan lindi. Selain itu, masyarakat Kabupaten Bandung Barat membuat program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti kegiatan Bank Sampah, mengolah sampah (*reduce, reuse, recycle*), dan membuat program penghijauan dengan menanam bibit pohon.

1.3.2.3. Isu Prioritas Pencemaran Air

✓ **Faktor Pendorong**

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan di bidang infrastruktur dan kegiatan pariwisata baik alam maupun non alam. Namun, seiring berjalannya pertumbuhan penduduk, kualitas air semakin menurun karena tingkat pencemaran juga semakin meningkat. Berdasarkan data kualitas air sumur dari DLH Kabupaten Bandung Barat (2019), parameter biologis untuk air sumur di tujuh desa tidak memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

✓ **Tekanan**

Pencemaran dari aktivitas domestik berkaitan erat dengan kondisi sanitasi. Kondisi sanitasi yang buruk akan menyebabkan pola hidup masyarakat yang tidak sehat, yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan Permenkes No.3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Fasilitas buang air besar yang ada, yaitu individu sebanyak 383.487 kepala keluarga, komunal sebanyak 57.438 kepala keluarga dan terdapat 16.072 kepala keluarga yang masih membuang air limbah domestiknya ke sungai.

Selain limbah domestik yang banyak masuk ke air sungai, di sepanjang aliran Sungai Citarum banyak menerima pembuangan limbah cair baik dari kegiatan industri yang kemudian menyebabkan pencemaran dan menurunnya kualitas air Citarum. Industri-industri yang membutuhkan sumber air dan juga pemukiman cenderung berkembang mendekati Sungai Citarum dan ini menjadi beban (pressure) untuk kualitas air tersebut.

✓ **Status**

Berdasarkan peta status mutu air rerata wilayah di Kabupaten Bandung Barat memiliki status mutu air sungai termasuk cemar sedang, karena berada pada nilai rentang 5-10. Namun, ada lima titik pantau yang memiliki status cemar berat. Selain itu, masih ada parameter biologis (total dan fecal *coliform*) di beberapa titik pantau yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu 5 titik pantau untuk fecal coliform dan 2 titik pantau untuk total coliform. Hal ini menunjukkan status pencemaran di ruas-ruas sungai tersebut yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Selain kualitas air sungai, kualitas air di waduk Saguling saat ini sudah dalam keadaan tercemar. Berdasarkan hasil pemantauan DLH Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 menunjukkan bahwa beberapa parameter terukur melebihi baku mutu PP No.82 tahun 2010 kelas II seperti TDS, TSS, BOD, COD, Fenol dan H₂S. Sedangkan untuk air tanah, rata rata parameter-parameter yang diukur baik itu fisik, kimia dan biologi masih memenuhi baku mutu dan hanya total *coliform* di satu lokasi yang melebihi baku mutu dan untuk air hujan, pH air hujan terukur antara 9.19 – 9.36 menunjukkan kondisi basa sehingga fenomena hujan asam (pH < 5.5) tidak terlihat dari pengukuran sesaat ini. Interaksi antara pencemar udara dalam bentuk gas seperti SO₂ dan NO_x yang berasal dari aktifitas antropogenik (manusia) terlihat belum memberikan dampak terhadap kondisi hujan asam di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hasil ini memerlukan pengukuran lebih lanjut untuk waktu yang lebih lama

✓ **Dampak**

Potensi beban pencemaran sumber air baku memiliki hubungan linear dengan pertumbuhan penduduk. Kawasan yang mendominasi di Kabupaten Bandung Barat adalah budidaya pertanian, sehingga kebutuhan air bersih yang dimanfaatkan dari sumber air baku yang paling banyak digunakan adalah aktivitas pertanian, di samping aktivitas sehari-hari. Selain itu, Tercemarnya sungai Citarum dan juga waduk Saguling serta badan permukaan air lainnya memberikan dampak terhadap sektor perikanan terutama budidaya ikan jaring terapung. Hasil wawancara, menunjukkan penghasilan petani ikan mengalami penurunan yang serius. Hasil panen pada musim kemarau (saat tingkat pencemaran tinggi) dan musim hujan jauh berbeda, jika pada musim penghujan hasil panen bisa mencapai 6 kuintal per petak untuk bibit 100 kilogram, sedangkan pada musim kemarau maksimal hanya mampu mendapatkan hasil sebanyak 3-4 kuintal (Mulyadi dan Atmaja, 2011).

Pencemaran sungai Citarum dan juga Waduk Saguling dilaporkan membawa dampak terhadap terganggunya kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar badan air tersebut. Masyarakat pun mulai mengalami keresahan akibat dari pencemaran air yang terjadi di Wilayah kabupaten Bandung Barat. Tercatat ada 5 pengaduan masyarakat terkait dengan pencemaran air yang disebabkan oleh industri maupun rumah tangga.

✓ **Respon**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya pengendalian pencemaran air limbah telah membuat instrumen pengendalian pencemaran, yaitu Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Air Limbah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 03 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain ini, DLH Kabupaten Bandung Barat menyusun sistem aplikasi yang digunakan untuk memantau kualitas air limbah yang dibuang oleh industri secara *online*. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Kualitas Air limbah Berbasis Teknologi Informasi.

INOVASI DAERAH

Inovasi daerah merupakan suatu upaya yang berupa kegiatan ataupun program pelestarian, pemeliharaan, dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut dirancang untuk mengendalikan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat. Berikut ini uraian singkat dari tiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat Kabupaten Bandung Barat:

Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kapasitas lembaga daerah harus ditingkatkan. Adapun kapasitas lembaga daerah yang ditingkatkan adalah anggaran pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas personil di bidang lingkungan, transparansi dan akuntabilitas informasi lingkungan hidup kepada masyarakat, dan pengembangan produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah

Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengendalikan isu prioritas lingkungan hidup, yaitu adalah sebagai berikut:

- Isu ketersediaan air bersih
 - Pengembangan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM)
- Isu persampahan
 - Operasional ramah lingkungan TPA Sari Mukti
 - Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
 - Program “Bebersih Bandung Barat (Beribadat)”
 - Pengembangan bank sampah
- Isu pencemaran air
 - Program “Citarum Harum Bestari”
 - Sistem pemantauan kualitas air limbah berbasis teknologi informasi (Sipetir)
 - Aplikasi pelaporan dokumen lingkungan berbasis digital

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, upaya lainnya untuk mengurangi terjadinya persoalan lingkungan hidup adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar mampu menggerakkan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri dan aktif. Peran serta masyarakat Kabupaten Bandung Barat yaitu melalui kegiatan ataupun program yang diinisiasi oleh lembaga swadaya masyarakat setempat, seperti:

- Kegiatan bebersih keliling lembur (berlibur);
- Aksi pungut sampah dan baksos;
- Operasi bersih tanggap sampah;
- *Paving block* dan ubin berbahan dasar sampah plastik;
- Gerakan peduli untuk Situ Ciburuy;
- Partisipasi aktif dalam program bank sampah;
- Taman vertikal desa jaya mekar; dan
- Ekowisata dan wisata edukasi.
- "KUSATUKAN" (Kumpulkan Sampah Untuk Sedekah dan Kebersihan)
- Kertajaya *Creative Destination*
- "NGARAMPA" (Ngangkut Runtah Milah Sampah)

- "GERCAPON" (Gerakan Cabut Paku di Pohon)

Kegiatan ataupun program yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh masyarakat akan diberikan penghargaan pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah maupun kementerian agar masyarakat dapat selalu meningkatkan peran serta dan kepedulian terhadap lingkungan.

1.4. Kesimpulan

Simpulan dari penyusunan DIKPLH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Diharapkan dapat mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di mana fokus utama perkembangan dan perubahan lingkungan hidup berdasarkan isu prioritas tahun 2020 adalah permasalahan ketersediaan air bersih, persampahan, dan pencemaran air. Hal ini selaras dengan target global pembangunan berkelanjutan, visi dan misi serta target dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat.
- Mendorong inisiatif berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan peningkatan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan kompetensinya dan atau secara sinergis dengan pelaku lain, khususnya terkait dengan isu prioritas lingkungan, yang dituangkan dalam Inovasi Lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

LAMPIRAN 1. SK Pembentukan Tim Penyusun DIKPLH



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 159 -DLH/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 58 seri D);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 61seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengumpulan data atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku laporan analisis dan buku ringkasan eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format buku laporan analisis dan buku ringkasan eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- c. melakukan validasi data atau informasi dan mengupayakan adanya data atau informasi tambahan;
- d. melakukan pengolahan dan analisis data atau informasi;
- e. menyusun buku laporan analisis dan buku ringkasan eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan hasil analisis data atau informasi, yang meliputi: isu prioritas lingkungan daerah, analisis *Draving Force-Pressure-State-Impact-Response* isu lingkungan hidup daerah serta inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 februari 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,



AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 900/Kep. 159 -DLH/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

- Pengarah : Sekretaris Daerah.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Ketua : Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 4. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Unsur Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Unsur Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Unsur UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Unsur Akademisi;
 11. Unsur Lembaga Masyarakat.

BUPATI BANDUNG BARAT,



AA UMBARA SUTISNA

BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

Nama : Zamilia Floreta, SP., M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 April 1975
Alamat : Komplek Cimareme Indah Blok C5 No.1 Cimareme Kecamatan
Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Pendidikan Terakhir : S-2 Ilmu Lingkungan UNPAD
S-1 Pertanian UNPAD
Riwayat Pekerjaan : **2000-2002** Dinas Perhutanan dan Konservasi
Tanah Kabupaten Bandung
2003-2008 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bandung
2009-2010 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Bandung Barat
2010-2013 Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Bandung Barat
2013-sekarang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bandung Barat

Bandung Barat,



Zamilia Floreta, SP., M.Si

BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

Nama : ILMI ROYAN GALIH SURYA, ST, MPSDA
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 18 Mei 1981
Alamat : Kp. Randukurung RT 01 RW 10 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat
Nomor Telepon : 082217082570
Pendidikan Terakhir : Magister Pengelolaan Sumber Daya Air
Riwayat Pekerjaan :

- Pelaksana pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (1 Maret 2009 s.d 31 Desember 2016)
- Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017)
- Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan (1 Januari 2018 s.d 13 Februari 2018)
- Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan (14 Februari 2018 s.d sekarang)

Diklat/Kursus/Bimtek :

- a. Diklat Pengawas Lingkungan Hidup
- b. Diklat Penilai Analisis Dampak Lingkungan
- c. Bimtek Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- d. Bimtek Penyusunan Dokumen Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
- e. Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD
- f. Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Bandung Barat,

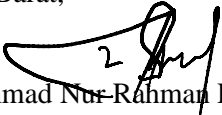

ILMI ROYAN GALIH SURYA, ST, MPSDA

BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

Nama : Mohammad Nur Rahman Hakim, ST., MT.
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 8 September 1979
Alamat : Citiis RT.01 RW.13 Desa Batulayang Kec. Cililin KBB
Nomor Telepon : 0811200813
Pendidikan Terakhir : S2
Riwayat Pekerjaan :

- Staf Bidang Fisik Bappeda Kab. Bandung 2005-2007
- Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang Bappelitbangda KBB 2007-2011
- Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda KBB 2011-sekarang

Bandung Barat,


Mohammad Nur Rahman Hakim

BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

Nama : DR. Eka Wardhani, ST.,MT

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 3 September 1975

Alamat : Jalan Tebu Ireng No 22 Komplek Pasir Jati Ujung Berung Bandung 40616

Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**

1. S1 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung lulus tahun 1998
2. S2 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung lulus tahun 2005
3. S3 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung lulus tahun 2018

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. *Occupational Health and Safety Management Systems (OHSAS)*, SGS Jakarta, Juli 2007
2. *Advanced Environmental Management System (EMS) Auditor Course*, SGS Jakarta, Agustus 2007
3. *QMS Internal Audit performance based Course*, SGS Jakarta, Oktober 2007
4. Pelatihan Teknik Manajemen di Lingkungan Industri Logam, Departemen Perindustrian Jawa Barat, Juni 2008
5. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Pembelajaran, Itenas Bandung, Juni 2009
6. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Dosen, Itenas Bandung, Desember 2009
7. Pelatihan Audit Mutu Internal, Itenas Bandung, Januari 2010
8. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta, April 2010
9. Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) UNPAD, November 2010
10. Pelatihan Penyusunan Dokumen Amdal Tahun 1998
11. Pelatihan Penilaian Dokumen Amdal Tahun 1998

Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 2005-sekarang Tenaga Pengajar di Jurusan Teknik Lingkungan Itenas Bandung

2. 2014-2019 tenaga ahli di PT Prolestari Bandung

3. 2014-sekarang tenaga ahli di PT Intimulya Multi Kencana Bandung

4. 2010-2015 tenaga ahli di PT Ecotera Multiplan Bandung

5. 2010-2014 tenaga ahli di PT Kwarsa Hexagon Bandung

Organisasi Profesi : 1. Anggota Asosiasi Pemegang Sertifikat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Intakindo Indonesia

2. Anggota Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI), Akreditasi

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

3. Anggota Ikatan Ahli Teknik Lingkungan dan Penyehatan Indonesia (IATPI)
4. Pemegang Sertifikat Pengajar *Environmental Pollution Control Manager* (EPCM) Provinsi Jawa Barat

Bandung Barat

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eka Wardhani'.

Dr. Eka Wardhani, ST.,MT

BIODATA TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

Nama : Dr. Eng. Didin Agustian Permadi, S.T., M.Eng.
Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 20 Agustus 1980
Alamat : Jln. Teritorial 106, Cigending, Ujung Berung, Bandung
Pendidikan : 1. S3: *Environmental Technology and Management, Asian Institute of Technology*, Bangkok, Thailand; 2013
2. S2: *Environmental Technology and Management, Asian Institute of Technology*, Bangkok, Thailand; 2007
3. S1: Teknik Lingkungan, ITB, Bandung, Indonesia; 2003
Riwayat Pekerjaan : **2018-sekarang Dosen tetap, Jurusan Teknik Lingkungan, ITENAS**
2015-2017 Staf peneliti senior dan dosen luar biasa, AIT, Bangkok, Thailand
2013-2014 Staf peneliti, AIT, Bangkok, Thailand
2011 Peneliti paruh waktu di Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE), Institute Pierre – Simon Laplace (IPSL), Orsay, Perancis
2007-2008 Staf peneliti, AIT, Bangkok, Thailand
2003-2005 Staf tetap konsultan PT. Pandu Persada, Bandung, Indonesia

Bandung Barat,



Dr. Didin Agustian Permadi, S.T., M.Eng

LAMPIRAN 2
BERITA ACARA
PENETAPAN ISU PRIORITAS
DALAM DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

NOMOR : 660/0965/DLH

Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2020
Tempat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
Ketua Tim : Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup (Zamilia Floreta, SP, M.Si)

1. Penetapan isu prioritas dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 disepakati oleh Tim Penyusun yang terdiri dari :
 - Dinas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat;
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat;
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat;
 - Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat;
 - Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
 - Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
 - UPT Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
 - Unsur Akademisi
 - Unsur Lembaga Masyarakat.
2. Disampaikan beberapa masukan, saran, tanggapan yang disampaikan oleh anggota tim penyusun sebagai pertimbangan dalam penentuan isu prioritas. Permasalahan lingkungan utama yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat terdiri dari permasalahan ketersediaan air bersih, permasalahan persampahan, dan pencemaran air. Ketiga isu lingkungan prioritas tersebut diperoleh berdasarkan hasil diskusi antara dinas/instansi, unsur akademisi, dan perwakilan dari masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Isu Permasalahan Ketersediaan Air Bersih

Jumlah penduduk yang terus meningkat memerlukan pasokan air bersih yang semakin banyak dengan syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang terpenuhi. Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.915.226 jiwa dengan kebutuhan air baku 12,836 m³/detik. Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air baku sebesar 5,113 m³/detik sehingga terdapat kekurangan air baku sebesar 7.723 m³/detik yang harus segera dipenuhi. Enam kecamatan dilanda krisis air bersih, akibat terdampak kekeringan pada musim kemarau yaitu Kecamatan Ngamprah, Cililin, Cikalongwetan, Parongpong, Cipongkor dan Gununghalu (BPBD Kabupaten Bandung Barat, 2019). Hal-hal yang menyebabkan kekurangan air yaitu:
 - o Berkurangnya debit sumber air baku utama di Kabupaten Bandung Barat yaitu Sungai Cijanggel akibat kerusakan DAS Cijanggel
 - o Tercemarnya sungai sebagai sumber air baku oleh limbah industri
 - o Tercemarnya sumur penduduk oleh limbah industri dan domestik
 - o Kerusakan jaringan perpipaan PDAM dan BUMD

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan ketersediaan air bersih menjadi salah satu isu prioritas di Kabupaten Bandung Barat

3. Isu Permasalahan Persampahan

Cakupan pelayanan sampah di wilayah Kabupaten Bandung Barat masih banyak belum terlayani yang menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana banjir. Ketika terjadi curah hujan yang tinggi dengan jumlah sampah semakin meningkat dapat menyebabkan banjir dan jalanan yang kotor. Hal ini karena sampah yang tidak terangkut atau terlayani terbawa oleh banjir melalui saluran drainase dan air hujan tersebut meluap bersamaan dengan sampah ke jalanan karena saluran tersebut tersumbat oleh sampah.

Pembuangan sampah di pinggir jalan masih banyak terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Timbulan sampah di KBB sebanyak 500-600 ton/hari. Namun hanya 150 ton yang bisa dikelola pemerintah, sedangkan sisanya dikelola secara konvensional. Untuk mengangkut sampah yang diproduksi masyarakat KBB, pihaknya mengandalkan 39 armada dengan 200 personel, termasuk penyapu jalan.

Tempat Pembuangan sampah Akhir/ TPA Sarimukti, di Kecamatan Cipatat, KBB yang menjadi lokasi pembuangan sampah dari empat Kabupaten Kota di Bandung Raya saat ini sudah melebihi kapasitas. Sampai saat ini telah melebihi kapasitas daya tampungnya. Perwakilan UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional (PSTR) Provinsi Jawa Barat. TPA Sarimukti dirancang untuk menampung sampah sebanyak 1.200 ton per hari. Atas hal tersebut PSTR Jawa Barat akan melakukan perpanjangan kontrak TPA Sarimukti hingga tahun 2025, serta melakukan penambahan luas lahan sebesar 21,2 hektare. Setelah TPA Legoknangka beroperasi tahun 2023 nanti. TPA Sarimukti akan dilakukan penataan ulang yang rencananya akan menjadi TPA zona barat di wilayah Bandung Raya yang tidak lagi menerapkan sistem pengelolaan sampah *Controlled Landfill*.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah sampah merupakan isu prioritas yang harus segera ditangani di wilayah KBB

4. Isu Pencemaran Air

Pencemaran air telah terjadi di badan air yang berada di wilayah KBB, permasalahan pencemaran air yang terjadi di wilayah ini diantaranya yaitu:

- a. Sungai yang berada di KBB termasuk anak sungai Citarum Hulu. kualitas air sungai yang ada di wilayah KBB yaitu Sungai Cihaur, Ciburandul, Cimindi, Cimerang, Cibingbin, Cipeusing, Citunjung, Citarum, Cireunde, Cigantungan, Cimeta, Cipada, Cigentur, Cimahi, Cikapundung, dan Cibeureum rendah dengan nilai indeks pencemaran D termasuk kategori cemar berat
- b. Tercemarnya kualitas air tiga situ di wilayah KBB yaitu Situ Ciburuy dan Lembang yang menyebabkan penurunan fungsi situ tersebut
- c. Pencemaran Waduk Saguling dan Cirata yang mengganggu fungsi dari kedua waduk tersebut

Akibat dari pencemaran air permukaan menyebabkan ketersediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan domestik, pertanian, perikanan, dan industri menjadi menurun dan diperlukan upaya mencari sumber air lainnya.

Kesimpulan: berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan Tim Penyusun DIKPLH Kabupaten Bandung Barat, yang menjadi Isu Prioritas adalah:

1. Isu Permasalahan Ketersediaan Air Bersih
2. Isu Permasalahan Persampahan
3. Isu Pencemaran Air

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

- Ketua Tim :

Zamila Floreta, SP, M.Si



- Sekretaris Tim :


Ilmi Royan Galih Surya, ST, MPSDA



- Anggota Tim (Perwakilan) :

1. Unsur Bappelitbangda

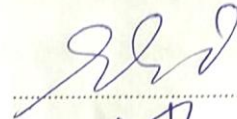
M. Nur Rahman Hakim, ST., MT.



2. Unsur Akademisi

- Dr. Eka Wardhani, ST., MT

(Jurusan Teknik Lingkungan Itenas)



- Dr. Eng Didin Agustian, ST., M. Eng

(Jurusan Teknik Lingkungan Itenas)



LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMBAHASAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLH) KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020

Pelaksanaan kegiatan pembahasan di DIKPLH dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 dengan Host Zoom Meeting di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Mekarsari, Ngamprah, Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552.

Peserta yang hadir dalam acara ini yaitu:

1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH KBB Provinsi Jawa Barat Zamilia Floreta, SP., M.Si
2. Ilmi Royan Galih Surya, ST, MPSDA
3. Mohammad Nur Rahman Hakim, ST., MT
4. Widya, ST
5. Dr. Eka Wardhani, ST., MT (Ketua Tim Penyusun DIKPLH)
1. Dr. Eng Didin Agustian Permadi, ST., M.Eng (Anggota Tim Penyusun DIKPLH)
2. Kamila Kansha, ST



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Dokumen DIKPLH



DIKPLHD KBB 2020

Dr. Eka Wardhani, S.T., M.T

Dr. Eng. Didin Agustian Permadi, S.T., M.Eng

Kamila Khalishah, S.T

Bandung, 20 Juli 2020

ALUR PEMBAHASAN



KELENGKAPAN DATA

Keterangan	Jumlah
Data blm terisi	7
Data lengkap	39
Data sudah ada yg terisi tetapi blm lengkap	19
Total	65



KELENGKAPAN DATA

Data belum terisi

- Bencana kekeringan, luas, dan kerugian
- Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
- Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
- Jumlah limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran
- Kegiatan fisik lainnya oleh instansi
- Penggunaan bahan bakar industri dan rumah tangga
- Suhu udara rata-rata bulanan

Data sudah ada yg terisi tetapi belum lengkap

- Bencana alam tanah longsor dan gempa bumi, korban, kerugian
- Bencana banjir, korban, dan kerugian
- Dokumen izin lingkungan
- Jenis pemanfaatan lahan
- Jenis tempat pembuangan akhir (tpa) sampah
- Jumlah bank sampah
- Jumlah dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
- Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurut tingkat pendidikan
- Jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar
- Jumlah rumah tangga dan sumber air minum
- Jumlah rumah tangga miskin
- Kualitas air sungai
- Kualitas udara ambien
- Luas area dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian
- Luas kawasan lindung berdasarkan RTRW dan tutupan lahannya
- Luas perubahan penggunaan lahan pertanian
- Luas wilayah menurut penggunaan lahan utama
- Realisasi kegiatan penghijauan dan reboisasi
- Perubahan penambahan ruas jalan



Data lengkap

- Anggaran pengelolaan lingkungan hidup
- Bencana kebakaran hutan/lahan, luas, dan kerugian
- Curah hujan rata-rata bulanan
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air
- Inovasi pengelolaan LH daerah
- Jenis penyakit utama yang diderita penduduk
- Jumlah kendaraan bermotor dan jenis bahan bakar yang digunakan
- Jumlah LSM lingkungan hidup
- Jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup menurut tingkat pendidikan
- Jumlah staf fungsional bidang lingkungan dan staf yang telah mengikuti diklat
- Keadaan flora dan fauna
- Kegiatan /Program yang diinisiasi masyarakat
- Kondisi danau/waduk/situ/embung
- Kondisi sungai
- Kualitas air hujan
- **Kualitas air laut**
- Kualitas air sumur
- Kualitas danau/waduk/situ/embung

Data lengkap

- **Luas dan kerapatan tutupan mangrove**
- **Luas dan kerusakan lahan gambut**
- **Luas dan kerusakan padang lamun**
- Luas hutan berdasarkan fungsi dan status
- Luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan
- **Luas tutupan dan kondisi terumbu karang**
- Luas wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk KBB
- Pelestarian kearifan lokal LH
- Penangkaran satwa dan tumbuhan liar
- Pendapatan asli daerah
- Penduduk domestik bruto atas dasar harga berlaku
- Penduduk domestik bruto atas dasar harga konstan
- Penerimaan penghargaan lingkungan hidup
- Pengawas izin lingkungan (amdal, ukl/upl, surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL))
- Perdagangan satwa dan tumbuhan
- Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari
- Perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah b3
- Produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
- Status pengaduan masyarakat

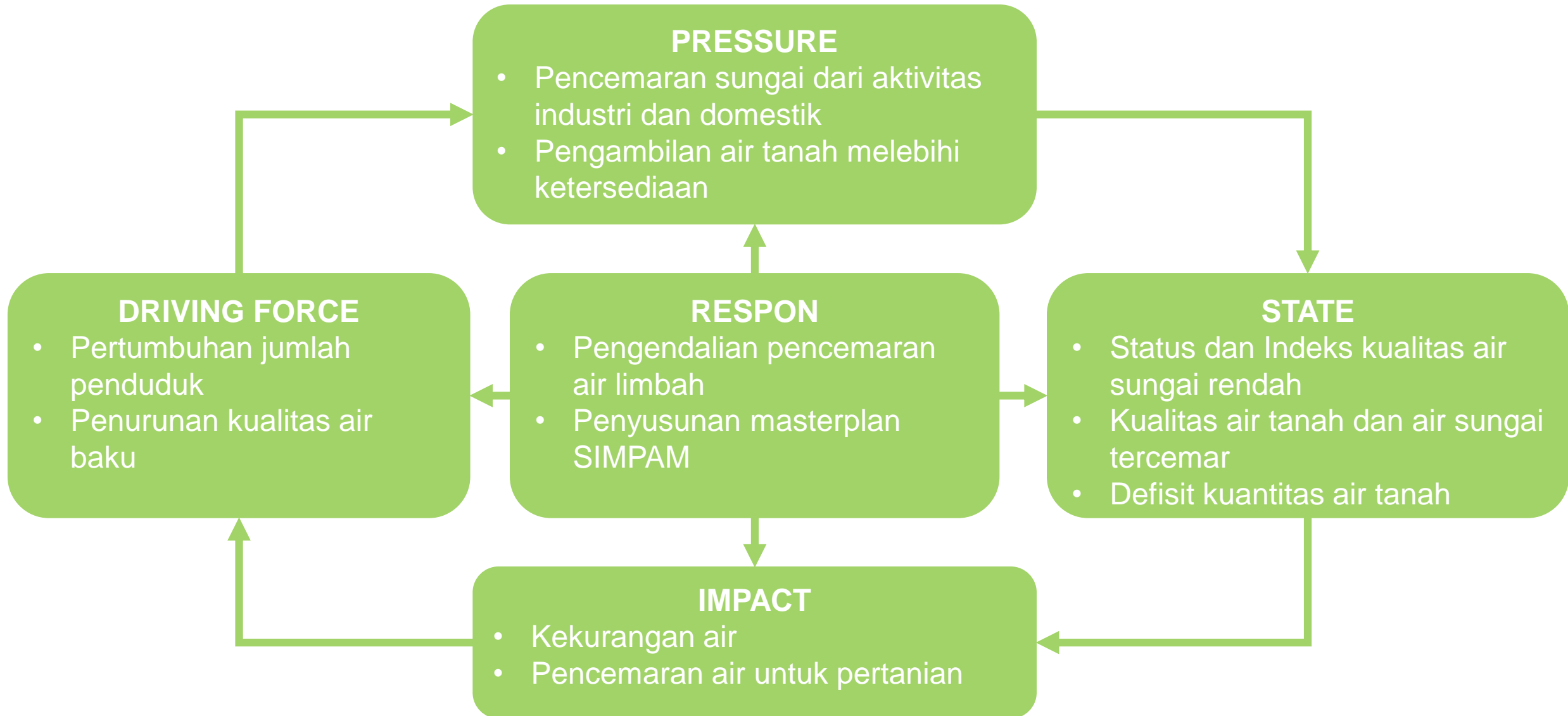


KERANGKA KERJA DPSIR UNTUK ISU LINGKUNGAN PRIORITAS

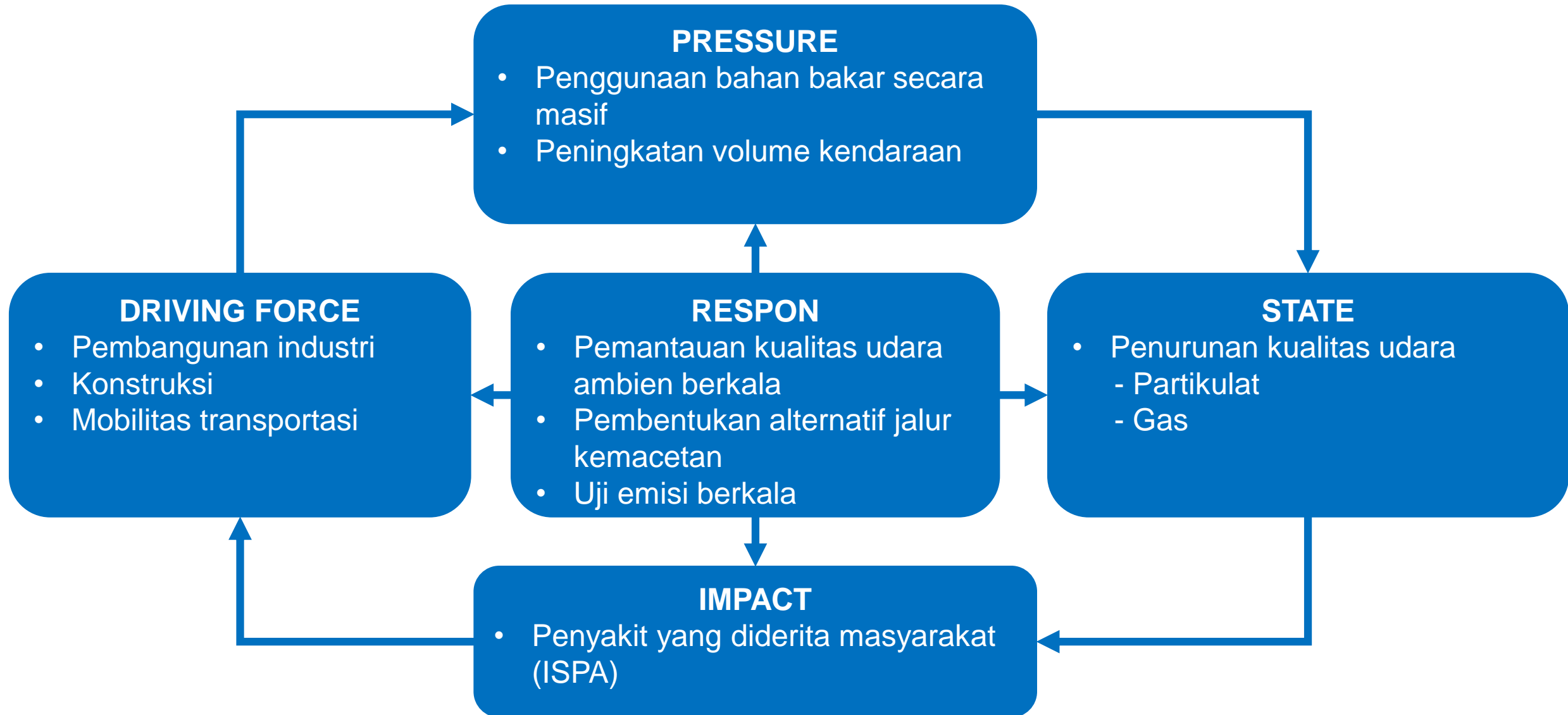
TATAGUNA LAHAN



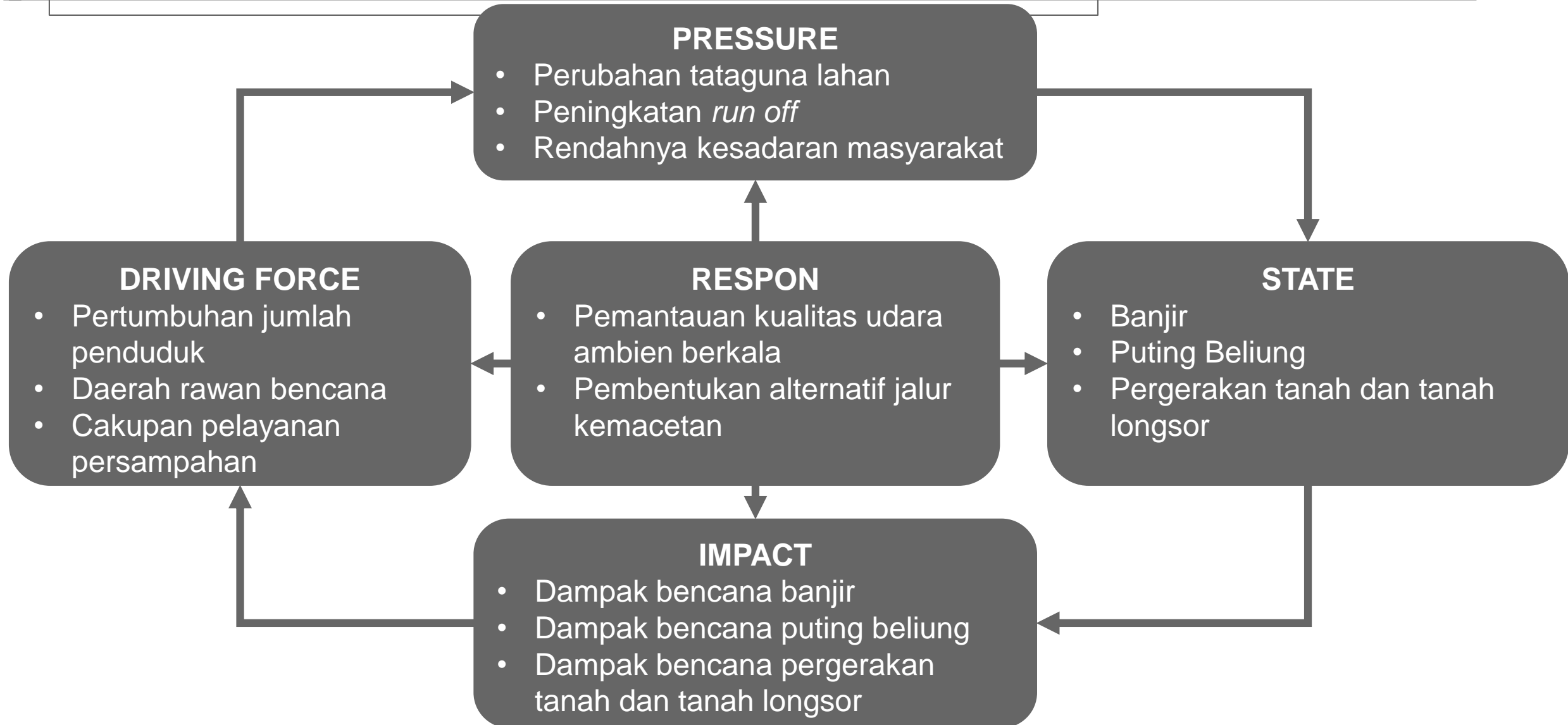
KUALITAS AIR



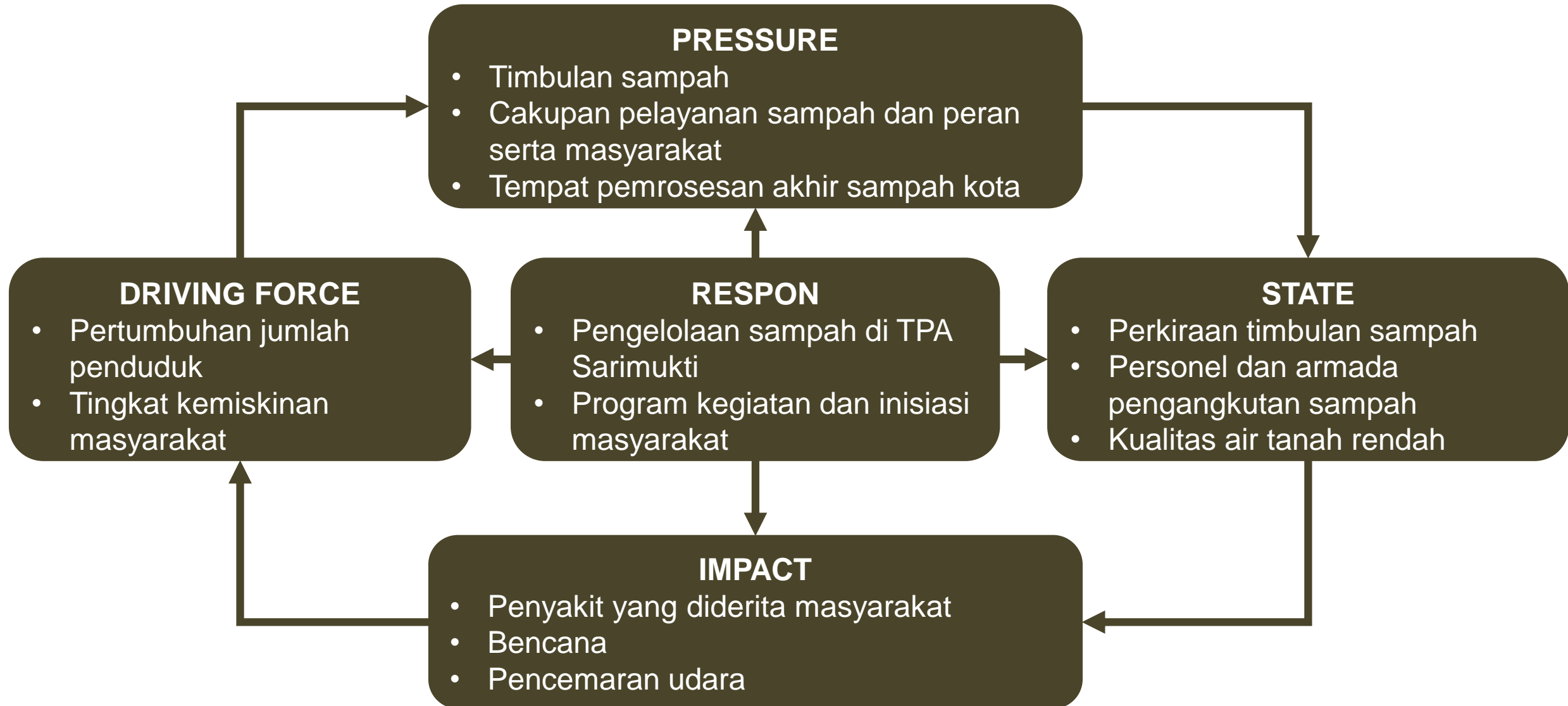
KUALITAS UDARA



RESIKO BENCANA



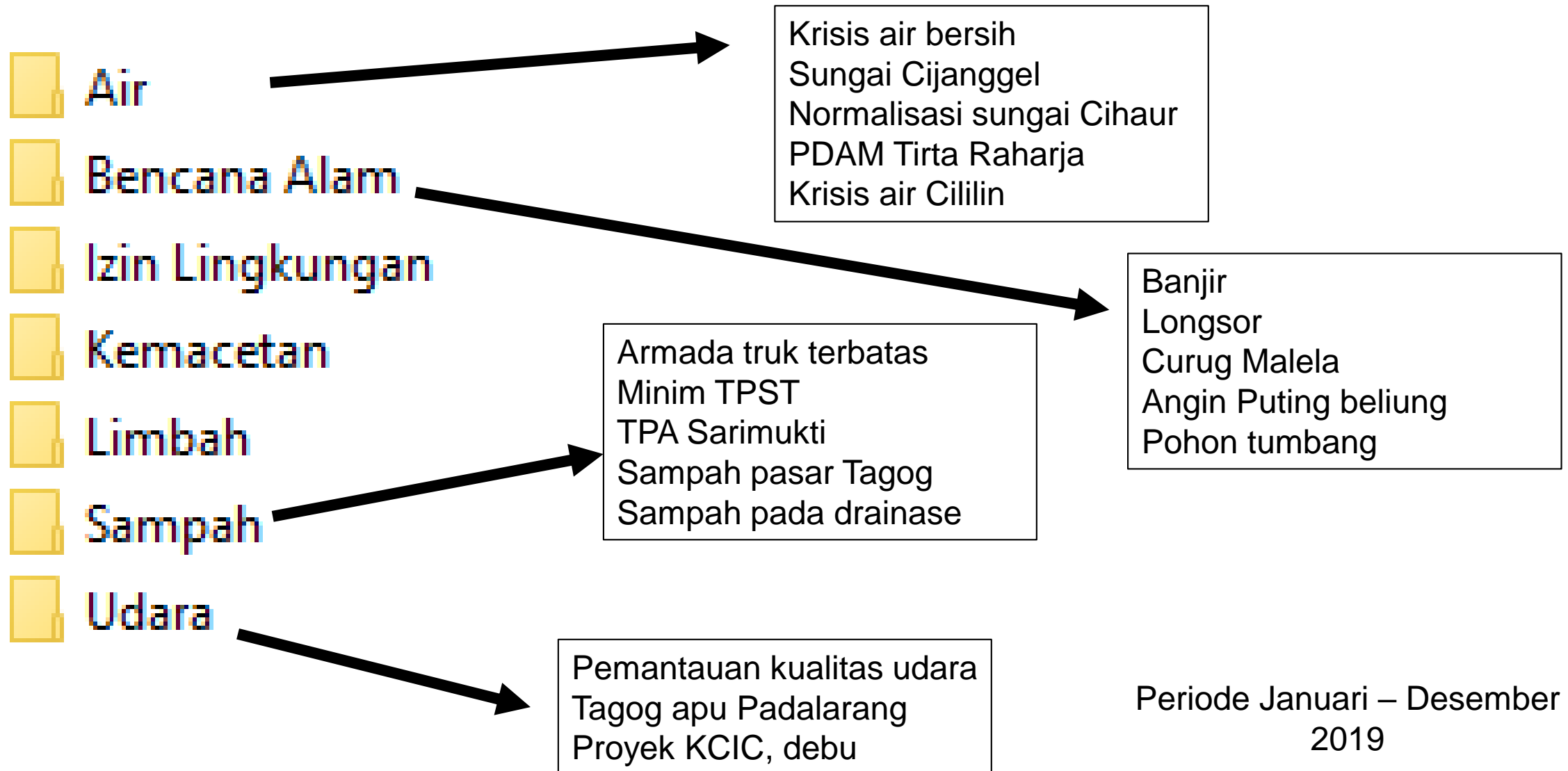
PERKOTAAN



TATA KELOLA



















HASIL SEARCH MEDIA (Ilustrasi kata kunci)




















KUMPULAN ARTIKEL DARI MEDIA MASA MENGENAI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI KBB

AIR

-  Ancaman Krisis Air Bersih, BUMD Tunggu Laporan BPBD
-  Belasan Pipa Milik BUMD Rusak, Akibat Pengerjaan Proyek Infrastruktur
-  BUMD Temukan Empat Pipa Diduga Ilegal di Sungai Cijanggal
-  Bupati Instruksikan Normalisasi Sungai Cihaur
-  DLH Pantau Kualitas Udara dan Air
-  Enam Kecamatan Alami Krisis Air
-  Krisis Air Bersih Melanda Sejumlah Desa
-  PDAM Alami Krisis Air Bersih
-  Perumda Air Minum Tirta Raharja Distribusikan 125.000 Liter Air Bagi Warga
-  Puluhan Ribu KK Terdampak Krisis Air
-  Sudah Musim Hujan, Warga Haji Gofur KBB Masih Kesulitan Air Bersih
-  Sumur Tua di Batujajar yang Airnya Tak Pernah Habis, Terancam Hilang
-  Warga Desa Cilame Alami Krisis Air Bersih
-  Warga Kesulitan dapat Air Bersih
-  Warga Tagih Janji Pemdes Soal Pembuatan Sumber Air
-  Warga Terdampak Longsor Cililin Keluhkan Minim Air Bersih

SAMPAH

-  3 Tahun Lahannya Dijadikan TPS Liar, Pemilik Lahan Protes dan Berniat Laporkan Polisi
-  Armada Terbatas, Perusahaan Banyak yang Belum Terlayani
-  DLH Bersihkan Sampah Liar di Sejumlah Titik
-  Dua Kecamatan jadi Alternatif Lahan Pengganti TPA Sarimukti
-  Karena Lingkungan Kotor dan Bau, Warga Minta Pabrik Pengolahan Sampah Plastik Ditutup
-  Minim TPST, Warga Bisa Buang Sampah di Pinggir Jalan
-  Musim Hujan, Volume Sampah di Kabupaten Bandung Barat Diprediksi Meningkat
-  Pelayanan Sampah Dinilai Belum Optimal
-  Pengelolaan TPA Sarimukti Selesai 2023
-  Sampah Menumpuk Mencapai 200 Ton
-  Selama Libur Lebaran Volume Sampah di KBB Mencapai 52 Ton
-  Sumbang 75 Ton Sampah ke Legoknangka
-  Tangani Sampah Pada Drainase Saat Musim Hujan, DLH KBB akan Sebar Petugas Kebersihan
-  Tolak Kota Bandung Buang Sampah ke TPS Sarimukti
-  TPA Sarimukti Melebihi Kapasitas, PSTR Jabar Perpanjang Kontrak Hingga 2025
-  Tumpukan Sampah Liar Marak di Perbatasan Dua Daerah
-  UPT Kebersihan KBB Angkut 12 Ton Sampah Sisa Tahun Baru, Dilanjutkan Sisa Banjir Bandang
- Warga Kesal dengan Tumpukan Sampah di Pasar Tagog
- Warga Minta Dibangun Tempat Pembuangan Sampah, DLH Bilang Lahannya Enggak Ada

IZIN LINGKUNGAN

- 17 Perusahaan dapat Raport Merah
- Alih Fungsi Lahan Minta Disetop
- Dewan Minta Pembangunan Waterboom di Lembang Segera Dihentikan
- Diduga Langgar Aturan, Pemprov Rekomendasikan The Great Asia Africa Ditutup
- DLH Bandung Barat UKL dan UPL Noah Park Tidak Sah
- DLH KBB Akui Galian C Bikin Rusak dan Cemari Lingkungan, yang Keluarkan Izin Pemprov Jabar
- DPRD KBB Temukan Dua Hotel Tak Punya Izin Dibangun di Lembang
- Kabupaten Bandung Barat Butuh Pencetakan Sawah Baru
- Kajian Lingkungan Sering Dilanggar
- Kerusakan KBU Harus Diperhatikan
- Kesadaran Melaporkan Dokumen Lingkungan Masih Minim
- Langgar Zona KBU, Ridwan Kamil Hentikan Proyek Perumahan
- Pembangunan Waterboom di Lembang Tidak Masalah Selama Ini
- Pemprov Jabar Berencana Tutup Sementara The Great Asia Africa
- Rawan Pergerakan Tanah, di Atas Sesar Lembang Seharusnya Tidak Boleh Ada Bangunan
- Resah Pembangunan Destinasi Wisata di Sesar Lembang, Muncul Petisi ini
- SPBU Lembang Didesak Untuk Ditertibkan
- Walhi Pramestha Harus Dikaji Ulang







KEMACETAN





- Bahu Jalan Ambles Sebabkan Kemacetan Panjang di Padalarang
- Ini Penyebab Utama Kemacetan di Tagog Padalarang
- Kemacetan di Lembang Makin Parah, Pengelola Tempat Wisata Tak Perhatikan Kantong Parkir
- Lima Kecamatan di KBB Rawan Bencana Alam
- Pemkab Kabupaten Bandung Barat Gelontorkan Rp 260 Miliar untuk Atasi Kemacetan, Mau Bikin Apa
- Polisi Sebut Solusi Paling Efektif untuk Mengurai Kemacetan di Padalarang Harus Ada pelebaran Jalan

LIMBAH








- Bandel! Masih Banyak Perusahaan Buang Limbah ke Sungai Malam Hari
- Cemari Sungai, Proyek Dihentikan
- Dan sektor 9 Marah Besar PT Combhiphar Masih Buang Limbah Tanpa Diolah
- DLH KBB Pastikan Sumur Warga di Padalarang Tak Tercemar Limbah, Warga Keluhkan Kerap Berwarna Hitam
- Sumur Warga Diduga Tercemar Limbah Pabrik




BENCANA ALAM

-  7 Kecamatan di KBB Dikepung Longsor, Pergerakan Tanah hingga Banjir Bandang
-  Banjir dan Longsor Terjang Bandung Barat, Sejumlah Rumah dan Sekolah Rusak
-  Banjir Diduga Akibat Proyek KCIC
-  BPBD Petakan Wilayah Ancaman Banjir Bandang
-  Dinding Bangunan Sekolah SDN 2 Gunung Bentang Padalarang Jebol Kena Luapan Banjir
-  Gorong-Gorong Kecil, Warga Lebaksari KBB Khawatir Banjir Kembali Terjadi, Begini Kata Wabup KBB

-  122 Bencana Alam Terjadi di Bandung Barat Sejak Januari-Juni 2019
-  Akhir 2019, BPBD Catat 11 Bencana Banjir dan Longsor Terjadi di KBB
-  Sebulan, Bandung Barat Dilanda 20 Peristiwa Bencana Alam
-  Waduh! Baru Saja Diresmikan, Curug Malela Jadi Berantakan

Name

-  BASUKI Kondisinya Tanah di Area Longsor KBB Seperti Bubur Karena Jenuh Air
-  Guyuran Hujan Deras, Lahan Dekat Tol Purbaleunyi KM 118 Kembali Longsor
-  Longsor Kembali Mengancam Dua Kecamatan di Bandung Barat
-  Longsor Sempat Tutup Akses Jalan Kolmas
-  Pergerakan Tanah di Ngamprah Ancam Warga
-  Pergerakan Tanah Rusak 23 Rumah di KBB, BPBD Minta Warga Mengungsi
-  Satu Rumah Ambles Akibat Longsor

-  Angin Puting Beliung Rusak Sepuluh Bangunan
-  Dua Mobil Tertimpa Pohon Tumbang
-  Waspada! Pohon Tumbang di Musim Hujan

ISU LINGKUNGAN TAHUN 2019

1. Isu Kerusakan Lahan dan Alih Fungsi Lahan
2. Isu Permasalahan Ketersediaan Air Bersih
3. Isu Permasalahan Persampahan
4. Isu Pencemaran Air

ISU LINGKUNGAN TAHUN 2020

1. Isu Permasalahan Ketersediaan Air Bersih
2. Isu Permasalahan Persampahan
3. Isu Pencemaran Air

Draft outline

19 Juli 2020

BAB I Pendahuluan

- I.1 Latar belakang
- I.2 Profil dan keadaan umum Kabupaten Bandung Barat
- I.3 Proses penyusunan DIKPLHD dan perumusan isu prioritas daerah
- I.4 Maksud dan tujuan
- I.5 Ruang lingkup

BAB II Analisis DPSIR Isu Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat

- II.1 Tata guna lahan (Tabel 1 – 17)
- II.2 Kualitas air (Tabel 22 – 30)
- II.3 Kualitas Udara (Tabel 36 – 40)
- II.4 Resiko bencana (Tabel 44 – 47)
- II.5 Perkotaan (Tabel 31, 35, 49-52)
- II.6 Tata kelola (Tabel 18-21, 41-43, 53-63, dan 65)
- II.7 Isu lainnya (Tabel 32-34)

BAB III Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat

Proses penentuan isu prioritas harus memperhatikan:

1. Keunikan daerah
2. Pencemaran atau kerusakan SDA yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup
3. Mendapat perhatian public luas dan urgent untuk ditangani (termasuk disorot media)

Kalau tahun 2018, isu prioritas adalah:

- III.1 Alih fungsi lahan dan lahan kritis
- III.2 Persampahan
- III.3 Penyediaan air bersih
- III.4 Isu pencemaran air

DRAFT OUTLINE

BAB IV Inovasi Kabupaten Bandung Barat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

- IV.1 Peningkatan kapasitas lembaga daerah
- IV.2 Peran serta masyarakat
- IV.3 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- IV.4 Perbaikan tata kelola lingkungan
- IV.4 Rangkuman inovasi untuk isu prioritas pada bab III

BAB V Penutup

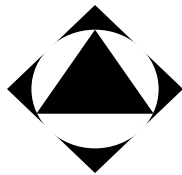
- V.1 Kesimpulan
- V.2 Rencana tindak lanjut

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

SEKIAN DAN TERIMA KASIH



SURAT TUGAS
No. 327/J.16.01/LP2M/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LP2M-ITENAS
JL. PHH Mustafa No. 23 Bandung

Menerangkan bahwa :

Nama	NPP	Jabatan
Dr. Eka Wardhani, S.T., M.T.	20050503	Dosen
Dr.Eng. Didin Agustian Permadi	20180701	Dosen

Ditugaskan untuk melakukan,

Kegiatan : Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
Sebagai : Tenaga Ahli
Tempat : Webinar/Video Conference
Hari/Tanggal : Senin/20 Juli 2020

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 17 Juli 2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M) Itenas
Kepala,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NPP. 20010601